

Analisis Peraturan Bupati No 27 Tahun 2018 tentang Penanggulangan HIV/AIDS di Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo

Vanni Alivyah Krisnandela¹, Lukman Arif²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
vanniakris23@gmail.com¹, lukman_arif.adneg@upnjatim.ac.id²

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of HIV/AIDS response policies in Krian District, Sidoarjo Regency, based on Sidoarjo Regent Regulation No. 27 of 2018. The method used is qualitative descriptive with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results of the study show that the implementation of HIV/AIDS response policies in Krian Subdistrict has been carried out through six main aspects, namely health promotion, HIV prevention, HIV diagnosis testing, treatment, care and support for people living with HIV/AIDS, HIV surveillance, and rehabilitation. The program implementation has generally been running well and has involved various parties such as the Krian Community Health Center, the Health Office, and the Delta Crisis Center NGO. However, the effectiveness of policy implementation still needs to be improved, especially in terms of human resource availability, funding allocation, and cross-sector coordination. The study results show that social environmental factors and the existence of localized areas also influence the increase in the number of HIV/AIDS cases in Krian District, so efforts to strengthen cross-institutional collaboration and optimize resources are needed so that HIV/AIDS prevention in the area can be more effective and sustainable.

Keywords : Policy Implementation, HIV/AIDS, Krian District.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2018. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Kecamatan Krian telah dilaksanakan melalui enam aspek utama, yaitu promosi kesehatan, pencegahan penularan HIV, pemeriksaan diagnosis HIV, pengobatan, perawatan dan dukungan ODHA, surveilans HIV, serta rehabilitasi. Pelaksanaan program secara umum berjalan baik dan telah melibatkan berbagai pihak seperti Puskesmas Krian, Dinas Kesehatan, serta LSM Delta Crisis Center. Namun, efektivitas pelaksanaan kebijakan masih perlu ditingkatkan terutama dalam hal ketersediaan sumber daya manusia, alokasi pendanaan, serta koordinasi lintas sektor. Hasil kajian memperlihatkan bahwa faktor lingkungan sosial dan keberadaan wilayah lokalisasi turut memengaruhi peningkatan jumlah kasus HIV/AIDS di Kecamatan Krian, sehingga diperlukan upaya penguatan kolaborasi lintas lembaga dan optimalisasi sumber daya agar penanggulangan HIV/AIDS di wilayah tersebut dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, HIV/AIDS, Kecamatan Krian.

PENDAHULUAN

Penyakit menular masih menjadi persoalan serius di berbagai negara, termasuk Indonesia, karena menimbulkan dampak sosial yang luas dan menjadi

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo diolah penulis

Penyebaran HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo saat ini telah menjangkau seluruh 18 kecamatan, menunjukkan bahwa permasalahan ini telah meluas di seluruh wilayah (Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, 2024). Sebagai bentuk komitmen penanggulangan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyediakan layanan kesehatan dan pemeriksaan HIV/AIDS di setiap kecamatan melalui puskesmas yang ditunjuk. Langkah ini merupakan implementasi dari Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2018 yang bertujuan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan bagi ODHA serta mempercepat deteksi dan penanganan kasus secara merata dan berkelanjutan. Berdasarkan data dari sidoarjosatu.com, jumlah kasus HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo tercatat sebanyak 5.830 kasus, dengan 70% penderita berjenis kelamin laki-laki dan 30% perempuan, di mana Kecamatan Krian dan Kecamatan Porong menjadi wilayah dengan jumlah penderita tertinggi (sidoarjokab.go.id). Berikut adalah tabel jumlah penderita HIV/AIDS Tahun 2024 dalam setiap kecamatan pada Kabupaten Sidoarjo :

Tabel 1. Data ODHIV Setiap Kecamatan Tahun 2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo diolah penulis

No.	KECAMATAN	JUMLAH
1.	Krian	229
2.	Porong	163
3.	Taman	155
4.	Waru	135
5.	Sidoarjo	126
6.	Gedangan	115
7.	Sukodono	110
8.	Krembung	78
9.	Sedati	75
10.	Candi	70
11.	Prambon	59
12.	Tulangan	54
13.	Balombendo	48
14.	Tanggulangin	42
15.	Tarik	36
16.	Wonoayu	34
17.	Jabon	26
18.	Buduran	20

Berdasarkan data, dari 18 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, penyebaran HIV/AIDS tertinggi terdapat di Kecamatan Krian dengan 229 penderita (Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, 2024). Kecamatan Krian memiliki dua puskesmas, yaitu Puskesmas Krian dan Puskesmas Barengkrajan, dan dalam penelitian ini dipilih Puskesmas Krian sebagai lokus penelitian. Menurut penjelasan Ratna Wulandari, Puskesmas tersebut merupakan fasilitas kesehatan pertama di Kabupaten Sidoarjo

yang membuka layanan pengobatan HIV/AIDS sejak tahun 2016, sebelum diikuti oleh Puskesmas Porong dan Taman pada tahun 2017. Faktor lain yang menyebabkan tingginya kasus di wilayah Krian adalah keberadaan lokalisasi di sekitar area tersebut, seperti Stasiun Krengseng dan Pasar Sapi, yang meskipun telah digusur pada tahun 2019, aktivitas serupa masih berlangsung di area belakang Rumah Sakit Sidoarjo Barat yang kini dikenal sebagai “Hotspot” tempat berkumpulnya pekerja seks komersial (kabarxxi.com, 2025). Hal ini turut menjelaskan mengapa Kecamatan Krian menjadi wilayah dengan kasus HIV/AIDS tertinggi di Kabupaten Sidoarjo.

Dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS, Puskesmas Krian membuka pelayanan pengobatan khusus melalui Poli Voluntary Counseling and Testing (VCT) yang menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan, pemberian obat, serta sesi konseling bagi pasien HIV/AIDS. Selain itu, puskesmas juga melakukan kunjungan rumah kepada pasien yang dianggap berisiko, seperti pasien yang tidak rutin mengambil obat atau tidak datang saat jadwal kontrol kesehatan. Hal ini dijelaskan oleh Dr. Dwi Aditya Putra, selaku dokter penanggung jawab pasien HIV/AIDS di Puskesmas Krian, bahwa kegiatan kunjungan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap pasien agar tetap menjalani pengobatan secara teratur. Dalam pelaksanaannya, Puskesmas Krian tidak bekerja sendiri, melainkan berkolaborasi dengan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Sidoarjo, Yayasan Delta Crisis Center (DCC) sebagai lembaga pendamping ODHA, serta Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo yang turut membantu dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di wilayah Kecamatan Krian. Berikut adalah data ODHIV on ART pada tahun 2020-2024 pada Puskesmas Krian Kabupaten Sidoarjo :

Tabel 2. Data ODHIV on ART pada Tahun 2020-2024 pada Puskesmas Krian

Sumber data : Puskesmas Krian diolah oleh penulis

Tahun	ODHIV on ART	Meninggal
2020	161	45
2021	167	62
2022	177	78
2023	196	85
2024	220	98

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah penderita HIV/AIDS di Kecamatan Krian terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Puskesmas Krian Kabupaten Sidoarjo belum berjalan secara optimal. Sejalan dengan pendapat Kusmayadi (2022), keberhasilan suatu kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan. Selain itu, menurut Akasah (2020) dalam Kusmayadi (2022), pencapaian tujuan kebijakan publik hanya dapat diukur apabila tingkat keberhasilan implementasinya dapat diketahui. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penanggulangan HIV/AIDS di Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Analisis dalam penelitian ini difokuskan pada enam aspek, yaitu promosi kesehatan, pencegahan penularan HIV, pemeriksaan

diagnosis HIV, pengobatan, perawatan dan dukungan ODHA, surveilans HIV, serta rehabilitasi.

Melalui keenam aspek tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai sejauh mana implementasi kebijakan penanggulangan HIV/AIDS telah berjalan efektif di Kecamatan Krian. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan efektivitas program, dan memperluas jangkauan layanan bagi masyarakat terdampak HIV/AIDS. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian kebijakan publik di bidang kesehatan, khususnya terkait implementasi kebijakan penanggulangan penyakit menular di tingkat daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam implementasi kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2018. Pendekatan kualitatif dipilih agar peneliti dapat memahami fenomena sosial yang terjadi di lapangan secara komprehensif, khususnya terkait pelaksanaan kebijakan, peran aktor, serta faktor pendukung dan penghambat dalam penanggulangan HIV/AIDS. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, laporan tahunan, peraturan daerah, artikel ilmiah, dan situs web instansi terkait seperti dinkes.sidoarjokab.go.id. Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive dengan menggunakan metode snowball sampling, yaitu cara yang efektif untuk mengidentifikasi dan memilih informan melalui jaringan hubungan (Abdussamad, 2021).

Adapun beberapa informan dalam penelitian ini, yaitu Ibu Ns. Unsiyyatul Usriyyah, S.Kep. selaku Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinkes Kabupaten Sidoarjo; Ibu Ratna Wulandari, S.Kep.Ners. selaku Penanggung Jawab Program HIV/AIDS Puskesmas Krian; Bapak Dr. Dwi Aditya Putra selaku Dokter Penanggung Jawab HIV/AIDS Puskesmas Krian; Bapak Sunardi selaku perwakilan pendamping lapangan dari Yayasan Delta Crisis Center (DCC) Kabupaten Sidoarjo; serta beberapa orang dengan HIV/AIDS (ODHIV). Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, karena wilayah ini memiliki jumlah kasus HIV/AIDS tertinggi di Kabupaten Sidoarjo. Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan model analisis data model interaktif berdasarkan pendapat Miles dan Huberman (2014) dalam Sugiyono (2023:134), yang meliputi empat tahapan utama yaitu Pengumpulan Data, Kondensasi Data, Penyajian Data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Promosi Kesehatan

Menurut Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2018, promosi kesehatan merupakan bentuk intervensi penting dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyampaian informasi dan pembangunan kesadaran terhadap program pemerintah. Hal ini sejalan dengan pandangan WHO (1984) dalam Ramli (2023) bahwa promosi kesehatan tidak hanya berfokus pada perubahan perilaku, tetapi juga mencakup perubahan lingkungan yang mendukung perilaku sehat tersebut. Berdasarkan hal tersebut, kegiatan promosi kesehatan di Puskesmas Krian diwujudkan melalui pendekatan komunikasi, edukasi, dan penyebaran informasi secara terarah kepada masyarakat.

Promosi kesehatan di Puskesmas Krian tidak hanya sebatas memberikan informasi kesehatan, tetapi juga mencakup berbagai upaya lain yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan (Bakti, 2023). Salah satu bentuk nyata dari upaya tersebut adalah pelaksanaan sosialisasi mengenai pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS kepada masyarakat, terutama kelompok berisiko tinggi. Kegiatan ini dilakukan secara edukatif dan partisipatif dengan melibatkan tenaga kesehatan serta jejaring lintas sektor. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan anggaran dan dukungan kelembagaan yang berdampak pada keberlanjutan program.

Selain itu, melemahnya peran Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) akibat terhentinya dukungan dana turut mengurangi efektivitas kegiatan lintas sektor. Kondisi ini mempertegas pandangan Marwiyah (2022) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, baik manusia, materi, maupun metode. Dengan demikian, keberhasilan promosi kesehatan di Puskesmas Krian tidak hanya ditentukan oleh komitmen petugas lapangan, tetapi juga oleh dukungan struktural dan kebijakan berkelanjutan yang memastikan ketersediaan sumber daya untuk menanggulangi HIV/AIDS secara efektif di masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Akbar et al. (2021), keberhasilan implementasi kebijakan kesehatan juga ditentukan oleh efektivitas komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan kondisi di Puskesmas Krian, di mana sosialisasi dan koordinasi lintas sektor masih perlu diperkuat agar tujuan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS dapat tercapai.

Pencegahan Penularan HIV

Upaya pencegahan penularan HIV/AIDS menjadi aspek penting dalam strategi pengendalian penyakit menular sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2018. Menurut Arief Mansur (2008) dalam Herlina Hanum Harahap (2020), pencegahan merupakan tindakan untuk menahan agar sesuatu tidak terjadi, yang tidak hanya berfokus pada intervensi medis tetapi juga melalui pendekatan promotif dan preventif berbasis masyarakat. Nopriadi (2020) membagi pencegahan menjadi dua, yaitu primer melalui promosi kesehatan kepada masyarakat dan sekunder berupa diagnosis serta intervensi bagi ODHA agar dapat bertahan hidup. Oleh karena

itu, penting untuk meninjau pelaksanaan pencegahan HIV/AIDS secara menyeluruh agar strategi yang diterapkan dapat efektif dalam mengurangi risiko penularan dan memperkuat keterlibatan lintas sektor.

Pelaksanaan pencegahan HIV/AIDS di Puskesmas Krian telah menunjukkan implementasi kebijakan yang terarah sesuai sasaran. Grindle (1980) dalam Akib (2021) menjelaskan bahwa implementasi adalah proses administratif yang dimulai ketika tujuan, program, dan dukungan dana telah ditetapkan untuk mencapai hasil tertentu. Puskesmas Krian telah melakukan langkah strategis seperti edukasi bagi kelompok berisiko tinggi, pelaksanaan Mobile VCT, notifikasi pasangan, serta pemberian obat pencegahan (PreP) bagi pasangan yang terinfeksi HIV. Kegiatan tersebut melibatkan tenaga kesehatan, Dinas Kesehatan, dan LSM yang membantu menjangkau komunitas berisiko. Namun, keterbatasan SDM, pendanaan, serta sulitnya menjangkau populasi di luar wilayah administratif masih menjadi tantangan, sehingga dibutuhkan penguatan strategi dan koordinasi lintas sektor agar program pencegahan berjalan optimal dan berkelanjutan.

Selain aspek medis, upaya pencegahan juga perlu memperhatikan pengaruh media sosial terhadap perilaku masyarakat. Sari dan Sutabri (2023) menyatakan bahwa kemajuan teknologi informasi membawa perubahan perilaku dalam pencarian informasi, termasuk terkait aktivitas seksual berisiko. Berdasarkan pendekatan fenomenologi, Harmita (2022) mengungkapkan bahwa media sosial seperti *Facebook* dapat menjadi sarana interaksi yang berpotensi menimbulkan perilaku seksual berisiko. Di Kabupaten Sidoarjo, fenomena seperti adanya grup “Dunia Malam Krian Sidoarjo” menjadi contoh nyata perlunya perhatian dan pengawasan dari pihak terkait, terutama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo, agar risiko penularan HIV melalui media sosial dapat diminimalisir.

Pemeriksaan Diagnosis HIV

Pemeriksaan diagnosis merupakan proses penting dalam penetapan jenis penyakit berdasarkan hasil analisis yang cermat untuk membedakan satu penyakit dengan penyakit lainnya (Mauli, 2020). Dalam hal penanggulangan HIV/AIDS, pemeriksaan diagnosis menjadi langkah fundamental karena berfungsi sebagai deteksi dini agar kelompok berisiko dapat memperoleh layanan pengobatan dan dukungan lanjutan. Kecurigaan terhadap kemungkinan infeksi HIV didasarkan pada tanda klinis maupun faktor risiko tertentu (Kesehatan & Pertama, n.d.). Sesuai dengan arahan Kemenkes RI (2019) dalam Theresia et al. (2024), pelaksanaan diagnosis HIV harus berlandaskan pada lima prinsip utama (5C): *informed consent, confidentiality, counselling, correct test results, dan connections to care, treatment and prevention services*. Puskesmas Krian telah menerapkan prinsip 5C tersebut, yang menunjukkan bahwa pemeriksaan tidak hanya menekankan hasil medis, tetapi juga menjunjung tinggi etika, hak pasien, serta keamanan layanan. Keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) turut memperkuat konsistensi dan kualitas pelaksanaan pemeriksaan di lapangan.

Namun, implementasi di Puskesmas Krian masih menghadapi kendala pada keterbatasan sumber daya manusia, khususnya tenaga kesehatan yang memiliki pelatihan khusus di poli Voluntary Counseling and Testing (VCT). Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya cakupan serta frekuensi pemeriksaan HIV. Hal ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan Edward (1980) dalam Hildayanti et al. (2022), bahwa sumber daya merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pelaksanaan program. Oleh karena itu, penguatan kapasitas dan kompetensi tenaga kesehatan menjadi langkah prioritas agar pemeriksaan dan diagnosis HIV dapat berjalan secara efektif, berkelanjutan, serta berkontribusi signifikan terhadap upaya pencegahan penularan HIV/AIDS di tingkat layanan dasar.

Pengobatan, Perawatan, dan Dukungan pada ODHA

Pengobatan, perawatan, dan dukungan merupakan layanan terpadu yang berkelanjutan untuk memberikan bantuan medis, psikologis, dan sosial kepada Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) guna mengurangi permasalahan selama proses pengobatan (Risnawaty et al., 2024). Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2018, layanan ini menjadi aspek penting dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS di tingkat layanan primer. Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan memiliki peran strategis dalam memastikan keberlanjutan terapi antiretroviral (ARV), membangun hubungan suportif dengan pasien, serta menciptakan lingkungan yang inklusif dan bebas stigma. Hal tersebut selaras dengan tujuan program PDP (Pelayanan, Dukungan, dan Pengobatan) yang menekankan penguatan layanan kesehatan serta koordinasi lintas sektor sesuai kebutuhan ODHA (Suryadarma et al., 2023).

Pelaksanaan layanan pengobatan, perawatan, dan dukungan di Puskesmas Krian menunjukkan implementasi kebijakan yang baik. Meskipun fasilitas pengobatan telah tersedia di 38 layanan kesehatan di Kabupaten Sidoarjo, Puskesmas Krian memiliki keunggulan dari segi kemudahan akses bagi pasien untuk mengambil obat ARV setiap hari tanpa jadwal tertentu, sehingga pasien merasa nyaman menjalani pengobatan. Kondisi ini mencerminkan bentuk nyata kebijakan publik dalam bidang kesehatan yang bersifat mengikat dan berpihak pada masyarakat. Sejalan dengan pandangan Marwiyah (2022), pelaku kebijakan perlu memahami lingkungan sosial dan kebutuhan lapangan agar implementasi berjalan responsif terhadap kondisi pasien dan sesuai dengan tujuan kebijakan.

Selain itu, pendekatan kekeluargaan antara tenaga kesehatan dan pasien di Puskesmas Krian menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program. Kegiatan Community Home Based Care dilakukan melalui kunjungan rumah bagi pasien yang tidak rutin kontrol sebagai bentuk perhatian dan dukungan lanjutan. Kolaborasi dengan LSM Delta Crisis Center (DCC) juga memperkuat dukungan psikososial melalui pendampingan dan motivasi pasien agar pengobatan tetap berkelanjutan. Berdasarkan teori implementasi kebijakan, sikap dan kompetensi pelaksana berperan besar dalam keberhasilan program (Marwiyah, 2022). Sikap empati, profesionalisme, dan komitmen tenaga kesehatan menjadi modal utama

dalam menciptakan pelayanan yang efektif dan berorientasi pada kesejahteraan ODHA.

Surveilans HIV

Program pencegahan dan pemberantasan penyakit akan berjalan efektif apabila didukung oleh sistem surveilans yang baik (Kusumawardani et al., 2023). Surveilans HIV memiliki peran penting sebagai bagian dari sistem kewaspadaan dini dalam memantau tren penularan, mendeteksi wabah, serta mengevaluasi efektivitas intervensi untuk pengembangan kebijakan baru (Mann & Barocas, 2025). Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2018, kegiatan surveilans menjadi komponen utama dalam strategi penanggulangan HIV/AIDS yang menekankan pentingnya pencatatan dan pelaporan standar di setiap fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk Puskesmas. Dalam hal ini, Puskesmas Krian telah melaksanakan surveilans HIV dengan cukup baik melalui pemanfaatan sistem pelaporan berbasis teknologi seperti Google Drive yang terintegrasi dengan aplikasi Sistem Informasi HIV/AIDS (SIHA).

Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaan kebijakan surveilans HIV di wilayah kerja Puskesmas Krian masih menghadapi kendala, terutama dalam aspek koordinasi dan kepatuhan pelaporan dari fasilitas kesehatan lainnya seperti klinik, praktik mandiri, dan bidan desa. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan surveilans tidak hanya bergantung pada sistem dan prosedur, tetapi juga pada kesadaran, komitmen, dan kepatuhan pelaksana di lapangan. Tidak adanya sanksi terhadap fasilitas yang tidak melaporkan menyebabkan data yang terkumpul belum sepenuhnya akurat dalam menggambarkan kondisi kasus di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan serta mekanisme pengawasan sebagaimana ditegaskan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo melalui surat edaran tentang kewajiban pelaporan triple eliminasi agar seluruh fasilitas kesehatan dapat berperan aktif dalam sistem pelaporan kasus HIV di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Penguatan sistem surveilans HIV memerlukan komitmen lintas sektor dan mekanisme pelaporan yang konsisten untuk memastikan data yang dihasilkan akurat serta dapat digunakan dalam perumusan kebijakan (Baltazar et al., 2021)

Rehabilitasi

Rehabilitasi memiliki peran penting dalam membantu Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) mencapai kemandirian fungsional, meningkatkan kualitas hidup, serta memperkuat kesejahteraan psikologis (Worthington et al., 2020). Adanya stigma, diskriminasi, dan penolakan sosial sering kali membuat ODHA kehilangan motivasi untuk menjalani kehidupan, sehingga diperlukan upaya rehabilitasi yang menyeluruh (Jonathan Prastya, 2020). Dukungan sosial yang kuat terbukti berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup ODHA, terutama melalui peningkatan resiliensi dan motivasi untuk menjalani pengobatan secara konsisten (Firman et al, 2025). Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2018, layanan rehabilitasi menjadi bagian strategis dalam memperkuat kualitas hidup ODHA baik

setelah diagnosis maupun selama proses pengobatan. Program ini dijalankan secara kolaboratif antara sektor kesehatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk memastikan bahwa pasien tidak hanya memperoleh layanan medis, tetapi juga dukungan sosial dan psikologis yang berkesinambungan.

Dalam pelaksanaannya, LSM Delta Crisis Center (DCC) memiliki peran penting dalam mendukung rehabilitasi bagi Orang dengan HIV (ODHIV) di Kabupaten Sidoarjo. Sebagai lembaga binaan Dinas Sosial, DCC berperan tidak hanya sebagai pendamping, tetapi juga sebagai sistem dukungan sosial yang memperkuat aspek psikososial melalui kegiatan konseling, pendampingan intensif, dan pemberian motivasi berkelanjutan. Program pendampingan dan konseling kelompok terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan psikologis serta rasa diterima pada ODHA melalui dukungan emosional dan sosial yang berkelanjutan (Prasyatiani & Sulistyarini, 2018). Keterlibatan DCC menunjukkan bahwa kebijakan penanggulangan HIV/AIDS memerlukan sinergi lintas sektor antara pemerintah dan non-pemerintah. Sikap empati dan komitmen dari tenaga medis serta pendamping DCC menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan, karena mampu menciptakan rasa aman dan diterima bagi pasien. Oleh karena itu, kolaborasi antara Puskesmas Krian dan DCC dapat dipandang sebagai wujud implementasi kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan sosial dan emosional ODHA sekaligus memperkuat keberlanjutan program rehabilitasi HIV di Kabupaten Sidoarjo.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Analisis Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penanggulangan HIV/AIDS di Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pada umumnya telah berjalan baik, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu dioptimalkan. Aspek promosi kesehatan terlaksana dengan cukup baik melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, namun dukungan kelembagaan dan pendanaan masih menjadi kendala utama dalam pelaksanaannya. Aspek pencegahan penularan HIV telah dijalankan dengan baik melalui penyediaan layanan edukasi, pelaksanaan *mobile VCT*, serta pemberian obat pencegahan (PreP), namun kurangnya koordinasi lintas sektor dan keterbatasan sumber daya manusia menyebabkan cakupan layanan belum optimal. Aspek pemeriksaan diagnosis HIV berjalan dengan baik karena adanya layanan VCT (Voluntary Counseling and Testing), penerapan prinsip 5C dan dilengkapi dengan SOP pemeriksaan, tetapi masih terkendala pada minimnya tenaga medis yang terlatih. Pada aspek pengobatan, perawatan, dan dukungan bagi ODHA, berjalan dengan baik melalui adanya pendampingan, fleksibilitas pengambilan obat ARV, serta kegiatan *Community Home Based Care* menggunakan pendekatan kekeluargaan. Aspek surveilans HIV telah berjalan cukup baik dan dilaksanakan secara rutin, tetapi data pelaporan masih belum terintegrasi secara maksimal antarinstansi. Sementara aspek rehabilitasi bagi ODHA menunjukkan perkembangan positif dan perlu dipertahankan untuk keberlanjutan program penanggulangan HIV/AIDS. Penelitian ini menegaskan

bahwa efektivitas implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia, koordinasi lintas sektor, serta dukungan anggaran yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas pelaksana kebijakan, peningkatan sinergi antarinstansi, penambahan alokasi dana, serta peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat agar upaya penanggulangan HIV/AIDS di Kecamatan Krian dapat terlaksana secara optimal, berkelanjutan, dan berdampak signifikan terhadap penurunan jumlah kasus HIV/AIDS.

DAFTAR PUSTAKA

- A., A. J., & Barisan, B. (2020). Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Penanggulangan Hiv Dan Aids Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 4(2), 540–548. [https://doi.org/10.25299/wedana.2018.vol4\(2\).2650](https://doi.org/10.25299/wedana.2018.vol4(2).2650)
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (Vol. 6, Issue Desember). CV. syakir Media Press.
- Adinia Rahmi, F., & Kriswibowo, A. (2023). Proses Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Hiv/Aids Di Kabupaten Sidoarjo. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(9), 4181–4188.
- Akbar, R. B. M. T. A. P., Virdani, D., Kasih, K. D., & Arif, L. (2021). *Implementasi Kebijakan Vaksinasi COVID-19 di Kota Surabaya*. *Journal Publicuho*, 4(2), 501–510. <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i2.18061>
- Akib, H. (2021). Implementasi Kebijakan: Apa, mengapa Bagaimana. *Jurnal Adminstrasi Publik*, 1(1), 1–100. <https://media.neliti.com/media/publications/97794-ID-implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b.pdf>
- Bakti, I. G. M. Y. (2023). Penyuluhan Kesehatan dan Promosi Kesehatan: Sebuah Tinjauan Konseptual. *Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan Dan Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 18(02), 140–148.
- Baltazar, C. S., Horth, R. Z., Inguane, C., Sathane, I., César, F., Ricardo, H., ... & Raymond, H. F. (2021). *Recognizing the hidden: Strengthening the HIV surveillance system among key and priority populations in Mozambique*. *BMC Public Health*, 21(1), 1–10. <https://doi.org/10.1186/s12889-020-10110-y>
- Firman, H., Yona, S., & Waluyo, A. (2025). *Resilience, social support, and quality of life among people living with HIV/AIDS*. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 28(1), 28–37. <https://doi.org/10.7454/jki.v28i1.1337>
- Harmita, D. (2022). Penggunaan Media sosial terhadap pe. 5, 1–23. <https://ejournal.indobarunasional.ac.id/index.php/jursima/article/view/586%0Ahttps://ejournal.indobarunasional.ac.id/index.php/jursima/article/download/586/343>
- Herlina Hanum Harahap. (2020). Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 186–190. <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v4i2.551>

- Hildayanti, A., Parawangi, A., & Rasdiana. (2022). Implementasi Sistem Informasi Publik Berbasis Website di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 3(6), 1673–1686.
- Hukum-jdih, I. (2006). *Dok. Informasi Hukum-JDIH/2006*.
- Insani, S. M., Umam, K., & Miharja, S. (2022). Analisis Collaborative Governance Dalam Penanggulangan HIV / AIDs Di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 4(1), 143–159.
- Jonathan Prastya, A. B. (2020). Fasilitas rehabilitasi untuk penyandang hiv di badung, bali. *VIII(1)*, 1009–1016.
- Kemenkes RI. (2023). Ditjen P2P Laporan Kinerja Semester I Tahun 2023. Kemenkes RI, 1–134.
- Kemenkes RI. (2024). Laporan Eksekutif Perkembangan HIV AIDS dan Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS) Semester I Tahun 2024. Kemenkes RI, 913, 1–15. https://siha.kemkes.go.id/portal/files_upload/Laporan_TW_3_2022.pdf
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pengendalian HIV AIDS dan PIMS di Indonesia Tahun 2020-2024. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 1–188.
- Kesehatan, F., & Pertama, T. (n.d.). Program Pengendalian HIV AIDS dan PIMS.
- Kusmayadi, N. W. (2022). *Implements. Kebijakan Publik*, 13(2), 50–59. <https://doi.org/10.1017/s0081130000000630>
- Kusumawardani, E. F., Paradhiba, M., Fadillah, M., Putra, O., Saputra, F. F., Siahaan, P. B. C., Rimonda, R., Harahap, L. A. H., & Syam, N. (2023). Gambaran Pelaksanaan Surveilans HIV di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017. *Journal of Healthcare Technology and Medicine*, 9(1), 741. <https://doi.org/10.33143/jhtm.v9i1.2977>
- Mann, S. C., & Barocas, J. A. (2025). Bolstering the HIV Surveillance System Through Innovative Methods, Technologic Advances, and Community-Driven Solutions to Inform Intervention Efforts and End the Epidemic. *Current HIV/AIDS Reports*, 22(1), 1–9. <https://doi.org/10.1007/s11904-024-00720-1>
- Marwiyah, S. (2022). *Buku Ajar*.
- Mauli, D. (2020). Tanggung Jawab Hukum Dokter Terhadap Kesalahan Diagnosis Penyakit Kepada Pasien. *Cepalo*, 2(1), 33. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no1.1760>
- Nopriadi. (2020). *e-Book Pencegahan HIV dan AIDS.pdf*. UR Press.
- Prasyatiani, E., & Sulistyarini, I. (2018). *Efektivitas terapi kelompok pendukung terhadap kesejahteraan subjektif pada pasien HIV/AIDS*. *Jurnal Intervensi Psikologi*, 10(1), 61–70. <https://journal.uui.ac.id/intervensipsikologi/article/view/12647>
- Ramli, D. (2023). Teori dan Aplikasi Promosi Kesehatan. In *Keperawatan*.
- Risnawaty, N., Sofia Mariati Asnar, E., Wirawan, C., & Yuliaty, F. (2024). Peran Pelayanan Perawatan Dukungan Pengobatan (PDP) dan Kepuasan Pasien

- terhadap Kepatuhan Penggunaan Anti Retro Viral (ARV). *Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan*, 15(2), 2809–8862. <https://journal.ikopin.ac.id>
- Rizzana, S. (2020). Studi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 3(3), 160–165. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2017.003.03.1>
- Sari, Y. P., & Sutabri, T. (2023). Analysis of Social Media Abuse in Disseminating Content on the Facebook Application Using Semi-Descriptive Quantitative Methods. *Jurnal Sistem Informasi Dan Manajemen*, 11(1), 212–216. <https://ejournal.indobarunasional.ac.id/index.php/jursima/article/view/>
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif). *Metode Penelitian Kualitatif*, 1–274. <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Suryadarma, A. T. O., Fattah, S., & Kamariah, N. (2023). Implementasi Kebijakan Pelayanan Perawatan Dukungan Dan Pengobatan Pasien Human Immunodeficiency Virus Di Puskesmas Antang Makassar. *Jurnal Administrasi Negara*, 29(1), 82–103. <https://doi.org/10.33509/jan.v29i1.2301>
- Theresia, T., Situmorang, I., Sinulingga, E., Presetyowati, C. D., & Saputri, A. (2024). Keperawatan HIV AIDs. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue1). <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0A>
- Worthington, C., Myers, T., O'Brien, K., Nixon, S., & Cockerill, R. (2020). Rehabilitation in HIV/AIDS: Development of an expanded conceptual framework. *AIDS Patient Care and STDs*, 19(4), 258–271. <https://doi.org/10.1089/apc.2005.19.258>
- Yanti, F., Lestari, Y., & Yetti, H. (2020). Analisis Implementasi Program Penanggulangan HIV/ AIDS di Puskesmas Bungus Kota Padang Tahun 2020. *Jurnal Kesehatan Medika Saintika*, 11(2), 112–122. <http://dx.doi.org/10.30633/jkms.v11i1.847>